

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan *shareholder* (*principle*) dan konflik tersebut menjadi pemicu pergantian manajemen. Adanya perkembangan perusahaan yang semakin besar, maka tingkat intensitas terjadi konflik antara *principal* dengan *agent* menjadi lebih sering terjadi.

Elqorni (2009) mengenalkan tiga masalah utama yang terdapat dalam hubungan agensi: (a) kontrol pemegang saham kepada manajer, (b) biaya yang menyertai hubungan agensi, serta (c) menghindari dan meminimalisasi biaya agensi. Manajer juga melihat pergantian KAP dalam mengatasi konflik agensi (Defond, 1992 dalam Suparlan dan Andayani, 2010). Shleifer (1997) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa CG yang baik merupakan salah satu isu penting dalam masalah keagenan.

Pada suatu perusahaan, manajer merupakan orang yang dipercaya dalam menjalankan perusahaan, manajer umumnya memiliki informasi lebih mengenai posisi laporan keuangan yang “sesungguhnya” dan hasil kegiatan perusahaan daripada pemegang saham. Keadaan ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*) atau informasi yang

tidak simetris. Asimetri informasi terjadi karena *agent* lebih superior dalam mengetahui dan memahami informasi dibanding pihak lain (*principal* dan *stakeholder*). *Principal* menginginkan pengembalian yang cepat dan besar atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki, sedangkan *agent* memiliki tujuan untuk memperoleh kesempatan menerima bonus atau insentif yang besar sesuai dengan harapan atas kinerjanya.

Pelaporan informasi keuangan pada pemilik (pemegang saham) umumnya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi. Oleh sebab itu, untuk menghindari manipulasi akan pelaporan keuangan oleh manajer, kebutuhan akan auditor meningkat (Ismail *et al.*, 2008 dalam Sinarwati, 2010).

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang “Jasa Akuntan Publik”

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan partner audit yang diberlakukan secara periode tertentu. Peraturan tentang pergantian ini sudah diterbitkan pada tahun 2002 dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan. Didalam pasal 6 ayat 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 tahun 2002 tersebut dikatakan:

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (Lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”

Selanjutnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang berisi:

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1)”.

“Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3).”

Munculnya peraturan tersebut mengharuskan perusahaan untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor mereka sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

3. Pergantian KAP

Pergantian KAP merupakan hal umum yang dilakukan oleh perusahaan pada saat ini. Peraturan mengenai pergantian KAP dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut menjelaskan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan rotasi auditor (pergantian auditor) bila telah mencapai batas waktu perikatan yang ditentukan.

Argumen mendasar yang mendukung kewajiban rotasi audit, yaitu:

1) independensi auditor dapat dirusak oleh hubungan jangka panjang dengan manajer perusahaan, 2) kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Hubungannya dalam waktu yang lama dengan manajer perusahaan merupakan alasan utama yang mengancam dan merusak independensi auditor. Giri (2010) dalam Adityawati (2011) menyatakan hubungan yang semakin dekat dengan manajemen menyebabkan auditor lebih mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan manajemen daripada dengan kepentingan publik.

Giri (2010) dalam Adityawati (2011) juga menyatakan rotasi wajib selama lima tahun merupakan ketentuan yang mendorong peningkatan kualitas audit. Alasannya adalah sebagai berikut: 1) Pendekatan baru akan dibawa masuk oleh KAP baru setiap lima tahun sekali. Auditor yang mengaudit perusahaan yang sama dari tahun ke tahun akan kurang kreatif merancang prosedur audit; 2) Peningkatan kompetisi antara KAP akan didasarkan pada kualitas jasa audit; 3) auditor tidak akan tergantung secara ekonomi (*economic independence*) kepada klien, dan 4) Rotasi auditor akan memungkinkan KAP untuk saling mengawasi satu dengan yang lainnya.

Peraturan mengenai pergantian KAP memiliki kekuatan dan kelemahan pada kewajiban rotasi auditor. Alasan teoritis yang mendasari penerapan rotasi wajib bagi KAP dan auditor diharapkan dapat

meningkatkan sikap independen secara nyata (*in fact*) yaitu bila auditor secara nyata dapat menjaga sikap tidak memihak kepada siapapun dan independen dalam penampilannya (*in appearance*) yang berhubungan dengan bebas dari segala pertentangan kepentingan yang dapat mengganggu independen secara nyata (*in fact*).

Wijayanti (2010) menyatakan, ketika klien mencari auditor baru terjadi ketidaksimetrisan informasi antara KAP dan klien. Hal ini terjadi karena informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki auditor. Mardiyah (2002) menyebutkan dua faktor yang memengaruhi perusahaan melakukan pergantian KAP, yaitu: (1) faktor klien (*Client-related Factors*), terdiri dari: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* (IPO) dan (2) faktor KAP (*Auditor-related Factors*), terdiri dari: *fee* audit dan kualitas audit.

4. Opini Audit *Going Concern*

Opini audit adalah pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2002). Mulyadi (2002) menjelaskan empat tipe pokok laporan audit yaitu, opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified audit opinion*), opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified audit opinion*),

opini tidak wajar (*adverse opinion report*), tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion report*).

Opini audit merupakan hasil akhir berupa pernyataan yang dilakukan oleh auditor independen yang didapatkan dari proses pengauditan. Setelah melalui beberapa tahap proses audit, auditor dapat memberikan opini audit sehingga dapat memberikan kesimpulan atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Tandirerung (2006) dalam Sihombing (2012) menyatakan perusahaan akan memilih melakukan perpindahan KAP yang dipersepsikan dapat memberikan opini audit sesuai dengan harapan perusahaan apabila auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Carcello dan Neal (2003 dalam Sinarwati (2010) menyebutkan manajemen akan mengganti auditor akibat opini yang diberikan tidak sesuai yang diharapkan oleh perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk memperoleh auditor yang lebih mudah diatur.

Menurut Mc Keown *et al.* (1991) dalam Sinarwati (2010) menyatakan bahwa semakin kondisi perusahaan terganggu atau memburuk maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*. Jones (1996), Melumad dan Ziv (1997) dalam Sinarwati (2010) juga menyatakan bahwa jika suatu perusahaan mendapat opini *going concern* maka akan mendapatkan suatu respon harga saham negatif sehingga besar kemungkinan akan dilakukan pergantian auditor oleh manajemen jika auditor mengeluarkan opini audit *going concern*.

5. Institutional Investors (Kepemilikan Institusional)

Shleifer *et al.* (1997) dalam Suparlan dan Andayani (2010), menyatakan kepemilikan institusional berperan mengawasi perilaku manajer agar berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan perusahaan. Pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Permanasari, 2010 dalam Rahmawati, 2011).

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lembaga keuangan lainnya.

6. Public Ownership (Kepemilikan oleh Publik)

Rahmat Saleh (2004) menyatakan struktur kepemilikan memiliki hubungan positif dan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Terdapat dua aspek kepemilikan yang perlu dipertimbangkan yaitu kepemilikan oleh pihak luar dan oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan.

Konsentrasi kepemilikan pihak luar dapat diukur dengan presentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership's*). Konsentrasi kepemilikan pihak dalam dapat diukur dengan presentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan (*insider ownership's*). Kepemilikan

perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam memengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat.

7. Share Growth

Pihak internal maupun pihak eksternal sangat mengharapkan pertumbuhan perusahaan karena dapat memberikan aspek positif bagi perusahaan. Bagi investor, pertumbuhan perusahaan merupakan tanda bahwa perusahaan memiliki aspek yang dapat memberikan keuntungan, sehingga investor yang menanamkan dananya pada perusahaan mengharapkan *rate of return* (tingkat pengembalian) yang lebih baik dari dana yang telah mereka investasikan (Sriwardany, 2006).

Return yang dapat diterima investor dapat berupa *capital gain*, dan deviden. Deviden merupakan *return* yang lebih disukai oleh investor dari pada *capital gain*, hal ini dikarenakan resiko bila mengharapkan deviden lebih kecil. Semakin tinggi deviden yang diberikan perusahaan kepada investor, maka semakin tertarik investor menginvestasikan dananya pada perusahaan, sehingga semakin besar modal perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya serta melakukan pengembangan usaha. Dengan berkembangnya usaha suatu perusahaan, tentu saja akan meningkatkan perolehan laba perusahaan sehingga pertumbuhan perusahaan semakin tinggi.

8. *Large Board* (Dewan Komisaris)

Dewan komisaris merupakan salah satu inti dari mekanisme pengendalian internal. Melakukan pengawasan terhadap dewan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta juga menyeleksi, mengganti dewan direksi, serta mengawasi jalannya pergantian direksi merupakan salah satu tugas utama dewan komisaris (Umbara, 2008).

Untuk membantu fungsi dewan komisaris, maka dewan komisaris perlu membentuk komite audit yang membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Keberadaan komite audit yang efektif akan membantu terciptanya pengawasan internal yang memadai, keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas serta audit eksternal yang objektif dan wajar serta ketaatan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Komite audit juga dipercaya sebagai kekuatan kunci dalam melindungi kepentingan investor dan dapat memengaruhi *share price* perusahaan.

Direksi PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah mengeluarkan SK. Dir. BEJ no. 315/BEJ/06-2000 yang mewajibkan bagi perusahaan yang listing setelah tanggal 30 Juni 2000 untuk membentuk komite audit. Sedangkan untuk perusahaan yang telah listing, PT. BEJ mewajibkan perusahaan tersebut untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2001.

Menurut SK. Dir. BEJ no. 315/BEJ/06-2000 komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, antara lain meliputi:

- a. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan.
- b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- c. Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa semua resiko yang mungkin terjadi telah dipertimbangkan.
- d. Menelaah efektifitas pengendalian internal perusahaan.
- e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dalam menjalankan usahanya.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi.

Oleh karena itu, semakin baik komposisi dewan komisaris maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin baik komposisi dewan komisaris, maka semakin kecil tingkat ketidakpastian di masa mendatang, sehingga tingkat *underpricing*-nya akan rendah.

9. Pergantian Manajemen (Dewan Direksi)

Wahyuningsih dan Suryanawa (2007) menyatakan manajemen merupakan suatu kelompok orang yang secara aktif merencanakan, melakukan koordinasi, serta mengendalikan jalannya operasi transaksi

klien. Manajemen dalam konteks auditing adalah para pejabat perusahaan, pengawas, dan personel kunci sebagai penyelia (supervisor).

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Apabila perusahaan mengubah dewan direksi, baik direktur maupun komisaris, akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Sumadi, 2007).

10. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada. Sebaiknya komposisi modal harus lebih besar dari hutang (Hanafi, 2004).

Menurut Warsono (2003:34) Ada 2 macam rasio *leverage*, yaitu:

a. *Debt to Total Assets* (DAR)

Mengukur sejauh mana kewajiban perusahaan digunakan untuk mendanai pembelian atau investasi atas aktiva perusahaan (Warsono, 2003:34). DAR dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

b. *Debt to Equity* (DER)

Digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi total kewajibannya dengan menggunakan modal sendiri (Warsono, 2003:34).

DER dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

11. *Return on Equity* (ROE)

Untuk mengukur kinerja perusahaan, investor biasanya melihat kinerja keuangan yang tercermin dari berbagai macam rasio. *Return On Equity* (ROE) adalah indikator penting yang sering digunakan oleh investor untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan sebelum melakukan investasi. Return on Equity (ROE) juga merupakan salah satu metrik yang paling penting bagi investor, karena menunjukkan seberapa besar value yang dihasilkan perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Hanya saja, jika hanya melihat pada ROE saja tanpa memahami seluk beluknya secara mendalam, dapat berisiko.

Return on Equity (ROE) merupakan hasil pembagian antara *net income* (laba bersih) dengan *shareholders equity*. Laba bersih yang digunakan yaitu setelah dikurangi dengan dividen preferen (sebelum dividen biasa), sedangkan *shareholders equity* tidak meliputi saham preferen, melainkan hanya saham biasa. Apabila ROE naik, artinya tingkat pengembalian terhadap investasi dari pemilik modal (*shareholders equity*) meningkat dan kenaikan ROE juga bisa disebabkan oleh meningkatnya *leverage* (utang), yang menjadikan saham juga makin berisiko.

12. *Firm Size* (Ukuran Perusahaan)

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva (Sembiring, 2008).

Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan itu (Halim, 1997: 79-80). Expertise KAP merupakan salah satu atribut dalam servis KAP besar (Mardiyah, 2002). Adanya faktor expertise/profesional akan menentukan perubahan auditor oleh perusahaan sehingga perusahaan lebih memilih KAP yang besar.

13. Reputasi KAP

Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi (Sinarwati, 2010). Perusahaan tidak akan mengganti KAP jika KAP nya sudah bereputasi. KAP yang lebih besar (*Big 4*) dapat dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang memadai daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil karena mereka dapata menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang lebih besar, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu (Nasser *et al.*, 2006). Selain itu, KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan

berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga *image* mereka (Nasser *et al.*, 2006).

KAP bereputasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan *The Big Four Auditors*, yaitu:

- a. *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan.
- b. *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
- c. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta Siddharta & Widjaja.
- d. *PricewaterhouseCooper* (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & Rekan; Tanudiredja, Wibisena & Rekan.

14. Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Perusahaan

Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* ketika pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Mekanisme pengawasan dalam teori agensi dapat dilakukan dengan mekanisme *corporate governance* (CG). CG sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan (Permanasari, 2010).

Beasley (1996) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa dewan direksi berperan dalam memonitor proses pelaporan keuangan dan menemukan hubungan signifikan. Menurut Suparlan dan Andayani (2010), tingginya kepemilikan oleh investor institusional mendorong aktivitas monitoring karena besarnya kekuatan voting mereka yang akan memengaruhi kebijakan manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Permanasari, 2010).

15. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)	Variabel yang Signifikan dan Memengaruhi Pergantian KAP
Damayanti dan Sudarma (2007)	Ukuran KAP Fee Audit
Sinarwati (2010)	Pergantian Manajemen Reputasi Auditor Kasulitan Keuangan
Wijayanti (2010)	Ukuran KAP Fee Audit
Suparlan dan Andayani (2010)	Kepemilikan Publik <i>Share Growth</i> Ukuran Klien
Saud (2011)	Pergantian Manajemen
Rahayu (2012)	<i>Share Growth</i> Pergantian Manajemen

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007). Penelitian ini berjudul faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan berpindah Kantor Akuntan Publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ICMD perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2003-2005. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perpindahan Kantor Akuntan Publik sedangkan variabel independennya pergantian manajemen, opini akuntan, fee audit, kesulitan keuangan perusahaan, ukuran KAP dan presentase perubahan ROA. Hasil penelitian menemukan bahwa fee audit dan ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap perpindahan Kantor Akuntan Publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010). Penelitian ini berjudul mengapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah annual report perusahaan manufaktur tahun 2003-2007. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pergantian Kantor Akuntan Publik sedangkan variabel independennya opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor dan kesulitan keuangan. Hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh antara pergantian manajemen, reputasi auditor dan kesulitan keuangan menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010). Penelitian ini berjudul analisis hubungan auditor klien: faktor-faktor yang memengaruhi *auditor switching* di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ICMD perusahaan manufaktur tahun 2004-2008. Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah *auditor switching* sedangkan variabel independennya ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, kondisi keuangan, pergantian manajemen, opini audit dan fee audit. Hasil penelitian menemukan bahwa ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, kondisi keuangan, opini audit, dan fee audit berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparlan dan Andayani (2010). Penelitian ini berjudul Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik setelah ada Kewajiban Rotasi Audit. Data yang digunakan pada penelitian adalah ICMD perusahaan non keuangan dan investasi tahun 2006-2008. Variabel dependen pada penelitian adalah pergantian KAP, sedangkan variabel independen pada penelitian adalah Investor Institusional, Kepemilikan oleh Publik, *Share Growth*, Ukuran Dewan Komisaris, Pergantian Manajemen, *Leverage*, ROE, dan Ukuran Perusahaan. Hasil penelitian menemukan kepemilikan publik, *share growth*, dan ukuran klien berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian KAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Saud (2011). Penelitian ini berjudul faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2008. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pergantian Kantor Akuntan Publik sedangkan variabel independennya opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi negatife auditor, kesulitan keuangan,

spesialisasi industri KAP dan ukuran KAP. Hasil penelitian menemukan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2012). Penelitian berjudul Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik setelah ada Kewajiban Rotasi Audit. Data yang digunakan dalam penelitian adalah ICMD tahunan perusahaan manufaktur yang diperoleh di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005-2010. Variabel dependen (terikat) penelitian adalah pergantian KAP, sedangkan variabel independennya yaitu *Public Ownership*, *Share Growth*, *Large Board*, Pergantian Dewan Direksi, *Leverage*, Reputasi KAP, *Return on Equity (ROE)* dan *Firm Size*. Hasil penelitian menemukan *Share Growth* dan Pergantian Manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian KAP.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Opini Audit *Going Concern* terhadap Pergantian KAP

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Jones (1996), Melumad dan Ziv (1997), dalam Sinarwati (2010) menyatakan bahwa jika suatu perusahaan mendapat opini *going concern* maka akan mendapatkan suatu respon harga saham negatif sehingga besar kemungkinan akan dilakukan pergantian auditor oleh manajemen jika auditor mengeluarkan opini audit *going concern*.

Terdapat beberapa opini yang dapat mendorong perusahaan untuk mengganti KAP nya akibat opini yang diberikan. Antara lain, opini wajar dengan pengecualian atau yang dapat disebut *qualified audit opinion* memang cenderung kurang disukai oleh klien. Klien berusaha sedapat mungkin menghindari untuk mendapat opini *qualified*.

Pada penelitian sebelumnya seperti yang telah dilakukan oleh Chow dan Rice (1998) dalam Wijayanti (2010), telah berhasil membuktikan bahwa *qualified audit opinion* merupakan salah satu determinan yang memicu pergantian auditor, meskipun memang tidak terbukti bahwa perusahaan yang menerima *qualified opinion* akan menerima opini yang lebih baik setelah mereka melakukan auditor *switch*, sehingga perusahaan yang mendapatkan opini selain opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified audit opinion*) seperti opini wajar dengan pengecualian (*qualified audit opinion*) dan tidak memberikan pendapat cenderung akan berganti KAP. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Opini *going concern* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

2. *Institutional Investor* Terhadap Pergantian KAP

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional yaitu, pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain (Juniarti dan Sentosa, 2009).

Suparlan dan Andayani (2010) menemukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP, karena KAP yang lama

berkualitas. KAP yang lama dianggap dapat mempertahankan independensinya dan memberikan hasil audit yang baik. Pengawasan institusi tersebut akan mengurangi masalah keagenan.

Wibowo dan Rossieta (2009) dalam Adityawati (2011) menyatakan kepemilikan saham dapat menekan terjadinya *moral hazard* yang dilakukan manajemen yang berhubungan dengan peningkatan permintaan kualitas audit, sehingga perusahaan dengan kepemilikan saham oleh institusional yang mencakup perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan perusahaan investasi berpotensi melakukan pergantian KAP karena diakibatkan oleh peningkatan permintaan kualitas audit. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Investor Institusional berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

3. Publik Ownership terhadap pergantian KAP

Carey *et al.* (2000) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan proporsi kepemilikan saham non keluarga meningkat, maka timbul permintaan monitoring dan audit berkualitas. Guedhami *et al.* (2009) dalam Suparlan dan Andayani (2010)) menemukan kepemilikan saham menyebar mempunyai pengaruh penting untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang diwujudkan dalam pemilihan auditor dari KAP. Penelitian Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pergantian KAP. Semakin besar kepemilikan saham oleh masyarakat akan mendorong perusahaan untuk berganti auditor ke KAP yang berkualitas karena adanya peningkatan permintaan *monitoring*

audit berkualitas dari masyarakat. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: *Public Ownership* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

4. *Share Growth* terhadap Pergantian KAP

Loughram *et al.* (1997) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyebutkan bahwa perusahaan yang menerbitkan saham biasanya memperlihatkan perbaikan kinerja dan mengindikasikan peluang pertumbuhan dimasa depan. Knechel *et al.* (2008) dalam Suparlan dan Andayani (2010)) menyatakan perusahaan memutuskan untuk menggunakan KAP besar terkait dengan kebutuhan dana, ekuitas atau hutang. Penelitian Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah saham berpengaruh terhadap pergantian KAP. Penggunaan dana tambahan akan membutuhkan pengawasan yang tinggi sehingga investor lebih percaya kepada perusahaan, karena itu perusahaan akan lebih cenderung melakukan pergantian KAP untuk mendapatkan hasil audit yang lebih berkualitas. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: *Share growth* perusahaan publik berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

5. *Large Board* terhadap Pergantian KAP

Tally (2009) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menggunakan pengukur *CG* yang baik adalah dewan komisaris, pemisahan CEO dengan dewan direksi, dan investor institusional. Proksi *CG* banyak peneliti yang melakukan proksi yang berbeda. Dewan komisaris merupakan salah satu inti

mekanisme pengendalian internal perusahaan karena dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dewan direksi dan manajemen dalam mengelola perusahaan agar berjalan dengan baik (Umbara, 2008).

Suparlan dan Andayani (2010) tidak berhasil membuktikan bahwa jumlah dewan komisaris memengaruhi pergantian KAP. Kapasitas dewan komisaris yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya akan lebih efektif untuk melakukan monitoring yang dapat mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik, sehingga perusahaan akan melakukan pergantian KAP berdasarkan jumlah besarnya dewan komisaris karena dewan komisaris mempunyai kewenangan untuk mengangkat KAP. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: *Large Board* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

6. Pergantian Manajemen terhadap Pergantian KAP

Damayanti (2007) dan Nagy (2005) dalam Suparlan dan Andayani (2010) mendapatkan pergantian manajemen diikuti oleh perubahan kebijakan dalam akuntansi, keuangan, pemilihan KAP, perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansi. Beasley (1996) dalam Suparlan dan Andayani (2010) mendapatkan peran dewan direksi dalam memonitor proses pelaporan keuangan berhubungan signifikan dan memengaruhi kemampuan memonitor proses penyiapan laporan keuangan.

Suparlan dan Andayani (2010) menemukan pergantian dewan direksi tidak memengaruhi suatu perusahaan untuk mengganti KAP. Perubahan kebijakan oleh manajemen yang baru akan menyebabkan preferensi tersendiri

tentang auditor yang akan digunakannya, karena manajemen berharap KAP yang baru dapat bekerjasama dan lebih bisa memberikan opini seperti yang diharapkan oleh manajemen. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah:

H₆: Pergantian manajemen perusahaan berpengaruh positif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

7. *Leverage* Perusahaan terhadap Pergantian KAP

Kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan dapat memengaruhi perusahaan tersebut untuk mengganti auditor dengan alasan keuangan. Nasser *et al.* (2006) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak bangkrut. *Auditee* yang bangkrut (memiliki rasio yang rendah) dan memiliki pengalaman akan posisi keuangan yang tidak sehat lebih memungkinkan akan melibatkan auditor yang memiliki independensi tinggi untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan kreditor sama halnya dengan mengurangi risiko permasalahan hukum (Nasser *et al.*, 2006).

Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa *leverage* tidak menyebabkan perusahaan untuk berganti KAP. Kondisi keuangan perusahaan untuk audit memiliki peranan penting dalam membuat keputusan untuk mempertahankan KAP yang diputuskan oleh perusahaan maupun pemegang saham. Kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan lebih cenderung melakukan pergantian KAP karena adanya kemungkinan bahwa perusahaan tidak mampu untuk membayar biaya audit yang berkualitas.

Schwartz dan Soo (1995) dalam Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Auditor pada klien dengan kesulitan keuangan memiliki *tenure* yang lebih pendek dibandingkan dengan auditor yang berada pada klien yang lebih sehat keuangannya sehingga pada tahap tertentu KAP cenderung akan diganti karena ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah:

H₇: Leverage perusahaan berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

8. Return on Equity (ROE) terhadap Pergantian KAP

Ashbaugh *et al.* (2003) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menjadikan ROE sebagai variabel kontrol dalam penelitiannya untuk faktor-faktor yang menentukan pemilihan auditor oleh klien. Suparlan dan Andayani (2010) menemukan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP karena perusahaan dengan tingkat ROE yang tinggi akan diaudit oleh KAP yang besar, besarnya ROE dianggap dapat menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar KAP. Pada penelitian ini ROE diprediksi akan memengaruhi pergantian KAP karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar auditor dari KAP yang lebih besar. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah:

H₈: ROE perusahaan berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

9. *Firm Size* terhadap Pergantian KAP

Simunic *et al.* (1987), Francis *et al.* (1988), dan Abbott *et al.* (2000) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan hubungan positif antara ukuran klien dengan pemilihan perusahaan audit yang memiliki kualitas yang tinggi. Ettredge (2009) dalam Suparlan dan Andayani menyatakan ukuran perusahaan berhubungan positif dengan pemilihan KAP besar, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak menyebabkan perusahaan melakukan pergantian KAP.

Citron *et al.* (2001) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan ukuran perusahaan berhubungan positif dengan pemilihan KAP *the Big Six* dan pemilihan auditor yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan total aset sebagai proksi untuk *firm size*, besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan akan mendorong perusahaan untuk mencari KAP yang lebih besar karena dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah:

H₉: *Firm Size* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

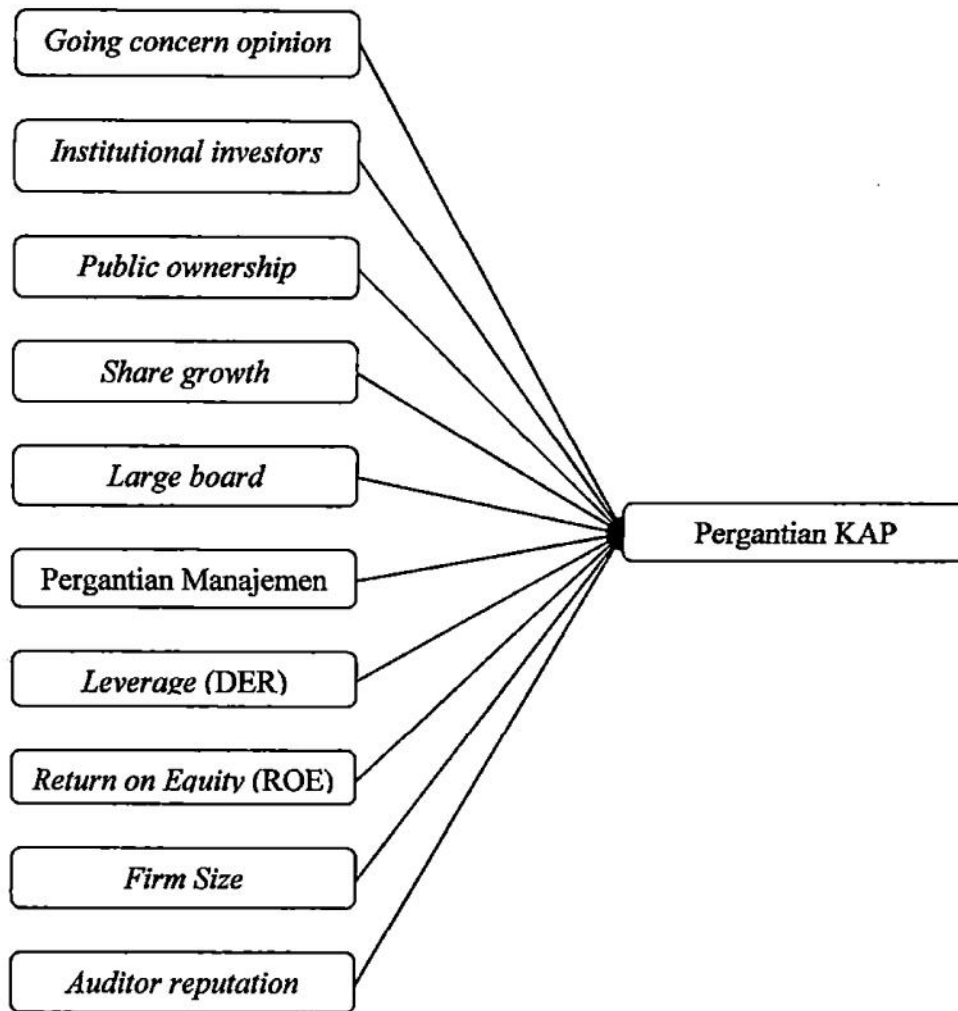
10. Reputasi KAP terhadap Pergantian KAP

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self-interest*, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara *principle* dengan *agent* sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi (Sinarwati, 2010).

Selain itu, KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga *image* mereka (Nasser *et al.*, 2006).

Perusahaan cenderung tidak mengganti KAP jika KAP nya sudah bereputasi karena KAP yang lebih besar (*Big 4*) dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang memadai dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil karena mereka dapat menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang lebih besar, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁₀: Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP.

C. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian